

Menggugat Grand Strategi POLRI Yang Tak Kunjung Terwujud

Edi Saputra Hasibuan ^{1,*}

¹ Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail:
edi.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: edi.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id

Submitted: 19/11/2023; Revised: 10/12/2023; Accepted: 04/02/2024; Published: 31/03/2024

Abstract

This paper discusses the strategic plan of the Indonesian National Police. The purpose of this study is to evaluate the implementation of the National Police grand strategy towards 2025, especially Phase I or known as trust building in the implementation period of 2005-2010 and the second phase of Partnership Building for 5 years 2010-2015, This is done because towards Strive for Excellence in 2016-2025 in building the ability of public trust and public trust to go to the current stage of excellence is difficult to realize because trust building cannot be stable because it depends on legal events involving cases of police members and services of police members in the community.

Keywords: Integrity, Police, Trust

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang rencana strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan grand strategy polri menuju 2025, khususnya tahap I atau dikenal dengan trust building dalam periode pelaksanaan tahun 2005-2010 dan Tahap kedua yakni Partnership Building Selama 5 Tahun Tahun 2010-2015, Hal ini dilakukan sebab menuju Strive for Excellence tahun 2016-2025 dalam membangun kemampuan kepercayaan publik dan dipercaya masyarakat untuk menuju tahap keunggulan saat ini sulit terwujud sebab trust building tidak bisa stabil sebab sangat tergantung terhadap peristiwa hukum yang menyangkut kasus anggota polri dan pelayanan anggota polri ditengah masyarakat.

Kata kunci: Integritas, Polisi, Kepercayaan

1. Pendahuluan

Dalam Era Digital saat ini khususnya masyarakat modern untuk terwujudnya supremasi hukum, maka kemampuan Polri dalam melaksanakan tugas law enforcement merupakan salah satu barometer profesionalitas Polri di mata masyarakat. Sebagai pengayom didalam masyarakat yang semakin kritis dan kompleks serta semakin berharap kepada rasa keadilan dan kepastian hukum, maka setiap kelemahan dan kekeliruan didalam pelaksanaan penyidikan oleh Polri akan mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat itu sendiri baik berupa komplain atau pengaduan masyarakat terhadap aparat Polri yang disampaikan kepada pihak- pihak atau institusi yang lebih tinggi dan terkait lainnya (Presiden, DPR, Komnas HAM, Police Watch,

Komisi Ombudsman, dll.). Hal ini merupakan suatu tuntutan publik atas pelayanan prima Polri guna terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri (Kominfo, 2020).

Seiring dengan reformasi dan kemandirian Polri tersebut diatas guna melaksanakan program organisasi modern sesuai dengan paradigma dan dinamika harapan masyarakat yang mendambakan keberadaan Polri, maka dibuatlah Grand Strategy 2005-2025 Polri melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) No. Pol.: Skep/360/IV/2005 tertanggal 10 Juni 2005. Lima tahun pertama, Tahap I tahun 2005-2010 dikenal dengan trust building, tahap II tahun 2011-2015 dikenal dengan partnership building, kemudian tahap III tahun 2016-2025 strive for excellent sebagai wujud pelayanan prima dari Polri untuk masyarakat. Pada intinya grand strategy ini dibuat untuk menopang terwujudnya aspek filosofis yang sama di tubuh Polri, dimana walaupun akan selalu ada pergantian Kapolri akan tetapi kebijakan yang dibuat harus tetap berkesinambungan. Grand strategy ini merupakan kewenangan administratif Kapolri berupa strategi kebijakan khusus mengenai prosedur dan ehnik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan dari Polri dalam kurun waktu 2005-2025 (Intan Fitri Mutia, 2011).

Grand strategy adalah perwujudan reformasi Polri, sebagai titik pijak pemulihan kepercayaan publik, diharapkan publik tidak hanya untuk menutupi persoalan-persoalan yang sesungguhnya terjadi di lembaga tersebut, tetapi sebagai awal perubahan dalam penyelesaian persoalan yang ada. Kepercayaan publik, sesungguhnya merupakan energi bagi Polri dalam menjalankan segenap tugas dan fungsinya. Tanpa adanya kepercayaan, apapun tugas yang dilakukan oleh kepolisian akan terus melekat citra buruk yang dibuat publik sendiri terhadap institusi Polri. Kepercayaan publik terhadap Polri nyaris berada pada titik terendah, tentu saja ini menjadi tantangan sekaligus hambatan dalam melaksanakan kinerjanya, sebagaimana terintrodusir dalam tahap pertama 2005-2010 reformasi Polri, yaitu trust building guna mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik yang signifikan atas eksistensi Polri sebagai lembaga yang professional (Kompas, 2015).

Dalam kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokrasi dan supremasi hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat serta menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan manfaat sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap publik sebagai stake holder dan customer (Ariman Sitompul, 2023).

Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari kemajuan zaman yang membuat modus kejahatan semakin canggih, menuntut Polri untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Seiring dengan bergulirnya era reformasi telah menggugah kesadaran seluruh komponen bangsa untuk melakukan pembenahan dan pembaharuan atas berbagai ketimpangan, kinerja dan hal-hal yang dianggap tidak professional serta proporsional menuju

masyarakat sipil yang demokratis. Polri pun tak lepas dari wacana besar perubahan ini. Sebab, kepolisian merupakan cerminan dari tuntutan dan harapan masyarakat akan adanya rasa aman, keamanan, ketertiban dan ketentraman, yang mendukung produktifitas yang mensejahterakan warga masyarakat (A. Wahyurudhanto, 2008).

Jika kita lihat lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 20-24 Juni 2023, tingkat kepercayaan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebesar 76,4 persen. Survei menggunakan sampel sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih (Safiul Samuda, 2023).

Menurut Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tingkat kepercayaan terhadap Polri yakni 10,8 persen sangat percaya dan 65,6 persen cukup percaya. Berdasarkan survei yang mereka lakukan pada bulan Agustus 2022, kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara berada di angka 54 persen. Angka itu terjun bebas pasca adanya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdy Sambo (Safiul Samuda, 2023). Namun, kurang dari setahun Polri berhasil memulihkan citranya bahkan sedikit menyalip Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Adapun tren kepercayaan terhadap Polri dalam pemberantasan korupsi juga meningkat. Pada Agustus 2022 cuma 63,9 persen. Kini pada Juni 2023 berada di angka 69,2 persen (Safiul Samuda, 2023).

Grand Strategy Polri menuju tahun 2025 bertujuan mengidentifikasi arah pembenahan dan pemberdayaan kekuatan Polri untuk menghasilkan efektivitas kinerja Polri dalam menghadapi berbagai masalah masa depan. Ruang lingkup Grand Strategy Polri dalam masing-masing periode tahapan pelaksanaannya mencakup dimensi utama dan organisasi Polri; baik strategi maupun kebijakan, yaitu pengembangan bidang kelembagaan, bidang capacity building sumberdaya; bidang teknologi dan infrastruktur kepolisian untuk mendukung operasi Polri, serta bidang kerjasama internasional dalam pengembangan teknologi kepolisian (Safiul Samuda, 2023).

Pada proses perencanaan strategis (strategic planning) terdapat tiga elemen dasar yaitu: formulasi rencana strategis, implementasi rencana strategis dan evaluasi rencana strategis. Setelah rencana strategis disusun maka tahapan selanjutnya adalah menata organisasi agar rencana strategis tersebut dapat dijalankan sehingga tujuan strategi tercapai. Selanjutnya, dilakukan evaluasi rencana strategis yang berisi tentang bagaimana kinerja dari implementasi rencana strategis dinilai. Dengan demikian akan dibangun kesamaan atau minimal kesetaraan pengukuran dan alat ukur bagi pengukuran kinerja itu sendiri. Untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi maka metodologi evaluasi sudah harus menetapkan kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk melakukan penilaian atas suatu strategi (Imam Turmidzi, 2014). Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Menggugat Gand Sultan Polri yang Tak Kunjug Terwujud*.

2. Metode Penelitian

Disiplin ilmu hukum yang mempunyai ciri khusus dalam menggunakan metode penelitian, termasuk dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menekankan pada studi literatur dengan menggunakan bahan-bahan primer perundang-undangan, buku, literatur, internet atau sumber-sumber hukum yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini, kemudian disajikan dengan sistematis yang menjelaskan suatu keadaan hingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam masyarakat modern di area digitalisasi saat ini, sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang informasi dan transportasi, permasalahan publik menjadi sangat kompleks. Tidak ada satu masalah yang hanya bisa dilihat sebagai "satu" aspek yang berdiri sendiri. Berbagai aspek saling terkait dan saling mempengaruhi. Keterkaitan ini tidak terbatas dalam lingkungan tertentu saja, tetapi bisa jadi dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dan menyangkut aspek yang berbeda, berlangsung dalam waktu yang amat cepat (Muhammad Ngafifi, 2014).

Sejalan dengan perkembangan studi yang makin maju, William Dunn mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu dia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai "ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecahpersoalan dalam kehidupan sehari-hari. "Di sini dia melihat ilmu kebijakan sebagai perkembangan lebih lanjut dari ilmu-ilmu social yang sudah ada. Metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan pemisahan satu aspek dengan aspek lain (Dunn, 1981).

Kinerja Polri dengan segala dinamikanya tidak boleh berhenti. Antisipasi atas berbagai persoalan di masyarakat harus terus dilakukan secara berkesinambungan. Untuk itu Polri telah membuat guidance line berupa Grand Strategy yang dibuat dalam tiga tahap dengan babakan waktu 20 tahun, yaitu tahun 2005 sampai 2025 yakni:

- 1) Tahap Pertama yaitu Trust Building Selama 5 Tahun Dari Tahun 2005-2010, Membangun Kepercayaan Masyarakat Kepada Polri;
- 2) Tahap kedua yakni Partnership Building Selama 5 Tahun Tahun 2010-2015, yang merupakan kelanjutan pihak pertama yaitu membangun kerja sama dengan pihak yang terkait.
- 3) Tahap ketiga yaitu Strive for Excellence tahun 2016-2025 membangun kemampuan kepercayaan publik dan dipercaya masyarakat untuk menuju tahap keunggulan

Tahun 2023 seharusnya sudah pada tahap tahap ketiga the stratif excellent (sempurna) namun kenyataannya saat ini polri tetap lepas pada fokus membangun trust building. Ini terjadi banyaknya kasus hukum yang melibatkan anggota polri mulai dari ferdi, Teddy, Akhirudin

hasibuan serta Kasus panjuruhuan malang. Sejumlah kasus ini berdasarkan hasil lembaga survai trust terhadap polri menurun drastis. Trust terhadap polri sekitar 58 hingga 60 potsen. Untuk meningkatkan trust dibutuhkan kerja keras dan ketegasan polri serta membuat berbagai terobosan pelayanan serta tegas menghukum setiap anggota melanggar hukum. Lihat ancaman hukuman ferdi sambo. Teddy dan akhirudin mereka dipecat. Maka kepercayaan terhadap polri secara bertahap terus meningkat hingga saat ini menuju 80 % polri dipercaya (Dian Dewi Purnamasari, 2023).

Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri mengalami penurunan 13 persen karena adanya kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo. "Kasus Ferdy Sambo membuat kepercayaan masyarakat kepada polisi menurun 13 persen, dari 72,1 persen (sebelum kasus) menjadi 59,1 persen (Syaiful Hakim, 2022).

Berbagai masalah yang muncul di permukaan sedikit banyak dipengaruhi oleh dampak negatif pembinaan SDM yang selama ini berjalan, antara lain: 1) inkonsistensi dalam penegakan aturan pembinaan SDM, khususnya dalam pembinaan karier; 2) rendahnya keteladanan positif dari unsur pimpinan; 3) menonjolnya pola hidup konsumtif; 4) pendekatan transaksional dalam aspek pelayanan terhadap anggota Polri; 5) tidak jelasnya parameter reward and punishment; 6) adanya kecenderungan pengelompokan perwira menengah membentuk suatu in-group yang eksklusif; dan 7) adanya kecenderungan (Mohamad Rangga Afianto, 2021).

Beberapa contoh di atas, telah memupuk "benih" kekecewaan yang menyebabkan sikap yang masa bodoh terhadap baik atau buruknya citra Polri di mata masyarakat, dan sikap tersebut terimplementasi dalam perilaku anggota Polri di lapangan yang kurang mengindahkan norma hukum, agama, peraturan disiplin serta kode etik Polri, guna memperoleh tambahan penghasilan diluar dinas, mengambil-alih keberhasilan anggota dan lepas tangan apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas kepada anggota. memperoleh pangkat, jabatan dan meraih pendidikan pengembangan dengan menghalalkan segala cara.

Kepemimpinan, keteladanan, konsistensi, komitmen dan moralitas yang ditunjukkan oleh para unsur pimpinan telah banyak mempengaruhi kepuasan kerja, memotivasi dan menginspirasi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku anggota dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk mengeliminasi dan/atau minimalisasi hal tersebut diperlukan suatu strategi meningkatkan pembinaan sumber daya manusia Polri khususnya mengubah mindset personel guna mewujudkan memwujudkan inspektur polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang bermoral, profesional, modern dalam melaksanakan tugas pokok guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Ariman Sitompul, Mhd. Sahan, 2021).

Organisasi yang baik, tumbuh dan berkembang akan menitikberatkan pada sumber daya manusia (human resources) guna menjalankan fungsinya dengan optimal, khususnya menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang terjadi. Dengan demikian kemampuan

teknis, teoritis, konseptual, moral dari para pelaku organisasi / organisasi di semua tingkat (level) pekerjaan amat dibutuhkan. Selain itu pula kedudukan sumber daya manusia pada posisi yang paling tinggi berguna untuk mendorong organisasi menampilkan norma perilaku, nilai dan keyakinan sebagai sarana penting dalam peningkatan kinerjanya.

Berbicara tentang kinerja personel Polri, menyatakan bahwa Kinerja merupakan sesuatu yang lazim digunakan untuk memantau produktivitas kerja personel Polri, yang berorientasi pada jasa, maupun pelayanan. Dampak dengan kurangnya penilaian kinerja yang jelas, tentunya mengurangi semangat anggota Polri untuk meningkatkan kemampuan dan skill profesionalismenya, sehingga timbul suatu persepsi bahwa kerja yang penting sudah masuk di kantor, apabila selesai jam dinas pulang ke rumah, sehingga yang rajin dan tidak berprestasi (Edi Saputra Hasibuan, 2022).

Penilaian tentang kinerja personel Polri semakin penting ketika organisasi akan melakukan reposisi personel. Artinya organisasi harus mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja personel Polri. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal McCloy mengatakan bahwa kinerja bisa berarti perilaku-perilaku atau tindakan- tindakan yang relevan terhadap tercapainya tujuan organisasi (goal relevan action). Tujuan-tujuan tersebut tergantung pada wewenang penilai yang menentukan tujuan apa yang harus dicapai personel Polri. Oleh karena itu kinerja bukan merupakan hasil dari tindakan atau perilaku, melainkan tindakan itu sendiri. Mc Cloy menguraikan bahwa agar seseorang melakukan suatu tugas sesuai dengan kinerja yang diinginkan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah memiliki pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan dan membuat pilihan dengan sungguh-sungguh untuk bekerja pada tugas pekerjaannya selama beberapa tenggang waktu tertentu dengan tingkat usaha tertentu (Mc Cloy, 1994).

Menurut Mathis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja personel Polri adalah komitmen mereka terhadap organisasi. Komitmen yang tinggi diakui mampu membangkitkan kedekatan emosional anggota terhadap organisasi, sehingga semangat juang untuk terus melakukan perbaikan telah menyatu dalam diri mereka, perilaku anggota Polri yang menjadi rumor selama ini semakin lama akan semakin berkurang, dan bahkan akan hilang sama sekali.

Dengan demikian citra Polri akan semakin meningkat dan menjadi kepercayaan masyarakat, Polri adalah mitra dan pengayom masyarakat. Tingkat komitmen yang tinggi akan menghasilkan loyalitas yang lebih tinggi, menumbuhkan kerjasama dan meningkatkan harga diri dan rasa memiliki yang lebih besar, kewibawaan, keterlibatan psikologik, dan merasakan suatu kesatuan yang bersifat integral dengan organisasi. Bahkan aktivitas apapun dalam suatu organisasi mensyaratkan komitmen yang tinggi dari anggotanya mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah.

Kepercayaan didefinisikan oleh beberapa peneliti sebagai perilaku seseorang untuk mengandalkan keandalan dan integritas orang lain dalam memenuhi harapan mereka di masa depan sehingga kepercayaan itu sangat penting dalam hubungan antar pengguna dan produsen

karena kepercayaan dapat mengurangi persepsi pengguna tentang risiko yang dirasakan masyarakat (Ferrinadewi, 2008). Jika kita melihat dari grand strategi polri maka pada tahap 1 sampai dengan menuju tahap 3 bisa tidak terpenuhi bahkan kembali lagi dalam perbaikan pada tahap 1 dan 2 dikarenakan kepercayaan masyarakat berkurang korp kepolisian, artinya pada tahap setiap tahap menuju akhir tahap konsistensi polri hukum wajib menuju tahun 2025.

Kita Melihat Slogan Presisi yaitu (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan), ada 16 program prioritas Sigit sebagai Kapolri yakni Penataan Kelembagaan, Perubahan Sistem dan Metode Organisasi, Menjadikan SDM Polri Yang Unggul di Era Police 4.0, Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0, Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum, Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional, Penguatan Penanganan Konflik Sosial, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri, Mewujudkan Pelayanan Publik Polri Yang Terintegrasi, Pemantapan Komunikasi Publik, Pengawasan Pimpinan Dalam Setiap Kegiatan, Penguatan Fungsi Pengawasan dan Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan (Public Complaint).

Program tersebut bila dilaksanakan dan konsistensi maka dapat mewujudkan Strive for Excellence pada tahun 2025, namun kenyataannya factor penghambat terwujudnya Strive for Excellence diantaranya adalah Penegakan Keadilan Kurang Berpihak pada masyarakat bawah, Pelayanan Polri dan Program Pelayanan Polri kurang berdampak pada masyarakat serta kasus kasus yang dilakukan anggota polr itu sendiri sehingga meruntuhkan bangunan kepercayaan masyarakat pada polri

4. Kesimpulan

Kepercayaan masyarakat pada polri merupakan perilaku polri untuk mengandalkan keandalan dan integritasnya dalam memenuhi harapan mereka di masa depan sehingga kepercayaan itu sangat penting dalam hubungan antar masyarakat dan polri karena kepercayaan merupakan pilihan antara membangun atau meruntuhkan suatu komitmen. Sehingga jika melihat tingkat kepercayaan masyarakat pada polri dan beberapa anggota polri yang tidak berintegritas maka Trust building tidak bisa stabil sebab sangat tergantung terhadap peristiwa hukum yang menyangkut kasus anggota polri dan pelayanan anggota polri ditengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- A. Wahyurudhanto. (2008). Analisis Deteksi Dini Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Implementasi Polmas Sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*], 12(8), 68.
- Ariman Sitompul, Mhd. Sahan, P. (2021). The Morality Of Law Enforcement Agencies (Police, Prosecutor's Office, KPK) In Money Laundering With The Origin Of The Corruption. *European Science Review*, 9(10), 57–59. <https://cyberleninka.ru/article/n/the-morality-of->

law-enforcement-agencies-police-prosecutor-s-office-kpk-in-money-laundering-with-the-origin-of-the-corruption

- Ariman Sitompul, E. S. H. (2023). Establishment of The Law On The Seizure of Assets Resulting From Money Laundering Based On Fair Law Enforcement In Indonesia. *SASI*, 29(3), 596–604.
- Dian Dewi Purnamasari. (2023). Polri Berupaya Perbaiki Citra Institusi. *Kompas*, 1. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/31/polri-berupaya-perbaiki-citra-institusi>
- Dunn, W. N. (1981). *Public Policy Analysis And Introduction*. USA: Prentice Hall, 8.
- Edi Saputra Hasibuan, L. S. (2022). Upaya Evaluasi Polri Sebagai Respon Perubahan Terhadap Deretan Kasus Di Tubuh Polri. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8.5.2017), 18164.
- Ferrinadewi, E. (2008). *Merek & Psikologi Konsumen Implikasi pada Strategi Pemasaran*. Graha Ilmu.
- Ida Bagus Kade Danendra. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4), 44–50.
- Imam Turmidzi. (2014). Implementasi Perencanaan Strategis Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan madrasah, Tarbawi. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 2(1), 91–95.
- Intan Fitri Mutia. (2011). *Evaluasi Grand Stratrgi Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahap I "Trust Building Periode 2005-2010*. Universitas Indonesia.
- Kominfo. (2020). Era Digital, Layanan Polri Harus Lebih Inovatif dan Profesional. *Kominfo*, 2. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/29844/era-digital-layanan-polri-harus-lebih-inovatif-dan-profesional/0/berita>
- Kompas. (2015). "Grand Strategi Polri 2005 2025". *Kompas*, 1. <https://www.kompasiana.com/andarurahutomo/566e44b93497733905e1e07a/grand-strategi-polri-2005-2025>
- Mc Cloy, et al. (1994). *Performance Appraisal*.
- Mohamad Rangga Afianto, S. D. (2021). Analisis Strategi Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri. *Syntax Literate*, 6(6), 2913.
- Muhammad Ngafifi. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Masyarakat Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 2(1), 34–45.
- Safiul Samuda. (2023). Survei Indikator: Kepercayaan Publik Terhadap Polri Meningkatkan Jadi 76,4 Persen. *TB News Tribrata Maluku Utara*, 1. <https://tribratanews.malut.polri.go.id/2023/07/02/survei-indikator-kepercayaan-publik-terhadap-polri-meningkat-jadi-764-persen/>
- Syaiful Hakim. (2022). Tingkat kepercayaan publik kepada Polri turun karena kasus Ferdy Sambo. *AnataraNews*, 1. <https://jatim.antaranews.com/berita/646633/tingkat-kepercayaan-publik-kepada-polri-turun-karena-kasus-ferdy-sambo>